



Dulang PAD, Bupati Enggan Beban Masyarakat

Abdul Khoir
Borneo Tribune, Sukadana

Sebagai kabupaten baru, banyak upaya akan dilakukan oleh Pemkab Kayong Utara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, semakin meningkatnya pendapatan daerah dari berbagai pungutan dan sejenisnya, pemertin-

gah belum berniat untuk membebani masyarakat dengan pungutan yang dianggap memberatkan.

"Dalam hal menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, saya tetap berpegang pada kerangka upaya yang tidak memberatkan masyarakat," kata Bupati Kayong Utara, Hidi Hamid, belum lama ini.

Bupati menyebutkan bahwa sumber PAD saat ini lebih didominasi oleh jasa giro dan penerimaan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) oleh investor perkebunan besar. Termasuk pula sum-ber pendapatan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama dirinya menjabat, Hidi menegaskan, kebijakan pengelolaan pendapatan tidak terlepas dari kondisi perekonomian di tingkat nasional dan regional, serta adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat berkaitan dengan penerimaan daerah. Kondisi ril perekonomian daerah yang

ditandai dengan mulai bergairahnya kegiatan investasi dan kegiatan usaha masyarakat, sangat mempengaruhi besaran penerimaan PAD.

"Meskipun hal tersebut masih belum seperti yang kita harapkan bersama," katanya.

Adapun kebijakan pendapatan yang ditempuh selanjutnya dengan sumber pendapatan daerah dengan tidak menambah beban masyarakat dan memberatkan dunia usaha.

"Tidak kalah pentingnya

adalah mempermudah sistem pelayanan kepada masyarakat," kata Hidi.

Pemkab juga terus mendorong iklim investasi melalui penyederhanaan prosedur perizinan serta menggarahkan iklim kegiatan usaha masyarakat. Selain itu, ada pula upaya Pemkab untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi guna meningkatkan rimaan daerah dari komponen dana perimbangan maupun bantuan keuangan dan bagi hasil pajak dari provinsi.

"Untuk target pendapatan (APBD 2013) sekitar lebih Rp 476 miliar atau terjadi peningkatan sekitar 3,22 persen," kata Hidi.

Adapun perkembangan realisasi pendapatan daerah dari 2008-2012 sebagai berikut. Realisasi pendapatan pada 2008 sebesar Rp 160.240.406,527,32. Pada 2009 mencapai Rp 320.276.778.697,68. Pada 2010 mencapai Rp 340.514.067.901,15.

Pada 2011 sebesar Rp 378.974.619.080,87 dan pada 2012 (nilai sebelum audit BPK) sebesar Rp 461.417.045.109,77.

"Untuk target pendapatan pada tahun berjalan (APBD 2013) sekitar lebih Rp 476 miliar atau terjadi peningkatan sekitar 3,22 persen," kata Hidi.

Dalam hal menggali sumber pendapatan asli daerah, saya tetap berpegang pada kerangka upaya yang tidak memberatkan masyarakat.

”